



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI MARDIANA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **764534**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.702.000.000

1. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 1994 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 4685 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, WARISAN Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 596 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, WARISAN Rp. 1.192.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 177.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ C240 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI W 175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250CC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 610.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 279.094.101**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.768.094.101



III. HUTANG

Rp. 1.248.106.772

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.519.987.329

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.